

Kakanwil Kemenkumham Jateng Sampaikan Pentingnya Peran Pembimbing Kemasyarakatan Saat Tutup Rakernis Pemasasyarakatan

David Fernanda Putra - KUDUS.UPDATES.CO.ID

Mar 9, 2024 - 20:25



Dok. Humas Rutan Kudus

Nusakambangan - Jumat, (08/03) Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) mendapat kesempatan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasarakatan Tahun 2024 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Berlangsung di Aula Lapas High Risk Karanganyar, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menutup kegiatan yang mengusung tema Pembentukan Pos Bapas Jakarta Utara untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan.

"Nusakambangan adalah tempat pilot Project Pemasarakatan. Di sinilah tempat kita semua jajaran Pemasarakatan membangun konsep pemikiran," kata Tejo.

Ia menilai, tugas dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) PK sangat krusial dalam menentukan proses dan hasil pembinaan pada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Di mana WBP memiliki hak dan kewajiban selama menjalani masa tahanan yang merupakan hasil assessment dari PK.

"Tugas PK berupa pengawasan dan pendampingan mengutamakan bagaimana WBP diberikan pembinaan kemandirian untuk membuka peluang usaha bekal mereka keluar nanti," ungkap Kakanwil.

Namun demikian, ia menyatakan masih kurangnya jumlah PK yang ada di lapangan. Terlebih pada daerah Jakarta Utara yang menjadi pembahasan dalam Rakernis ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan Alfonsus Wisnu Ardianto selaku Ketua Panitia Rakernis menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan standar pelayanan pemasarakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan dasar hukum dan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan antar Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Adapun pada pemaparan materi oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan Pujo Harinto dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan mengulik seputar tata cara pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lpas/Lapas/LPKA.

Tampak mengikuti acara, Kepala UPT se-Nusakambangan, serta Kepala Divisi Pemasarakatan dan Kepala UPT Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.